



DIY BELUM WAKTUNYA USULKAN PSBB

Sekda Tegaskan ASN Dilarang Mudik

YOGYA, TRIBUN - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin rapat membahas penanganan dan pencegahan wabah Covid-19 bersama Bupati dan Wali Kota serta Forkopimda DIY, Rabu (4/8).

Satu di antara yang dibahas dalam rapat tersebut soal isu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Rapat tadi, kabupaten-kabupaten dan kota, Forkopimda, belum waktunya kita menyampaikan PSBB. Tapi saya tetap mempersiapkan, kalau ada dan lonjakan penudik saja. Tapi belum waktunya karena belum memenuhi persyaratan epidemiologi dan sebagainya, maupun transmisi lokal dan sebagainya, jadi belum," ungkap Gubernur DIY, Sri Sultan HB X usai memimpin rapat.

Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menjelaskan, pada rapat tersebut seluruh kepala daerah menyampaikan kondisi masing-masing wilayahnya kepada Gubernur.

"Pada prinsipnya ada beberapa ketentuan dalam PSBB yang belum terpenuhi dalam kondisi sekarang misal tingkat penyebaran, transmisi lokal, kecenderungan (kasus) kita melandai. Karena sudah ada masukan dari Bupati dan Wali Kota, maka Pemda DIY menye-

Belum waktunya karena belum memenuhi persyaratan epidemiologi dan sebagainya, maupun transmisi lokal dan sebagainya, jadi belum.

sualkan," bebernya.

Aji menjelaskan, skema pengajuan PSBB berbeda saat Gubernur memutuskan status Tanggap Darurat Bencana Covid-19.

Saat Tanggap Darurat, Pemda DIY mengeluarkan status Tanggap Darurat, selanjutnya kabupaten dan kota diminta menyesuaikan dengan pembicaraan rapat koordinasi yang persis seperti rapat PSBB ini.

"Kita lihat dulu eskalasinya. Kalau ada peningkatan, kita akan bertemu lagi. Kita akan nyatakan PSBB atau tidak. Toh kalau kita memaksakan unsur PSBB, kalau belum memenuhi persyaratan, Kemenkes juga tidak akan memberikan rekomendasi," urainya.

Disinggung mengenai permintaan Bupati Sleman Sri Purnomo yang meminta agar hasil lab bisa keluar dengan cepat, Aji mengatakan bahwa proses yang lama terkait uji lab tidak hanya di-

alami DIY, namun seluruh daerah lain di Indonesia.

"Hasil tes yang paling cepat kalau pakai rapid test, tapi nggak bisa akurat. Sekali diperiksa, 10 hari diperiksa lagi. Jadi lama juga. Maka di DIY kita lakukan seleksi rapid test dan PCR, supaya tidak harus yang positif menunggu yang hasilnya negatif. Reagen laporan terakhir sudah ada, jumlah terbatas. Makanya kita prioritas, tidak semua kita lakukan tes, tapi ketersediaan waktu dan alat. Reagen (cukup sampai kapan) tergantung banyaknya pasien," beber Aji.

Sikap bupati-wali kota

Di dalam rapat bersama gubernur, pemerintah kabupaten dan kota di DIY merasa belum perlu untuk mengajukan status PSBB di wilayahnya masing-masing.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan bahwa dalam rapat tersebut, kepala daerah di kabupaten dan kota di DIY dimintai pendapat satu per satu terkait kondisi di wilayahnya dan pengajuan mengenai PSBB.

"Wilayah Kota Yogyakarta untuk PSBB ini memerlukan beberapa persyaratan artinya epidemiologi, sebarannya, dan lain-lain. Dari empat persyaratan yang ada, saya

Tindak Lanjut	
ra	☐ Untuk Ditanggapi
	☐ Untuk Diketahui
	☐ Jumpa Pers

ogyakarta,
Kepala

DIY Belum Waktunya Usulkan

● Sambungan Hal 1

sampaikan Kota belum perlu dilaksanakan PSBB. Nanti silakan tanya saja, rata-rata bupati lain juga sama," kata Wali Kota.

Namun ia tak memungkiri, ketika nantinya wilayah Kota Yogyakarta memenuhi kriteria dalam PSBB, maka kemungkinan pihaknya segera mengajukan PSBB.

"Mana kala persyaratan terpenuhi, akan mengajukan (PSBB). Kita belum memenuhi kriteria," ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Bupati Sleman, Sri Purnomo. Ia mengatakan bahwa prinsipnya, Sleman terkait putusan PSBB akan menunggu keputusan dari Gubernur.

"Kalau Sleman, kita masih berusaha mempertahankan Tanggap Darurat. Tapi kemudian kita lebih serius ke masyarakat akan bisa bersama-sama dengan pemerintah membersihkan wilayah, jaga jarak dilaksanakan, se-

tiap keluar mengikuti arahan presiden selalu gunakan masker," bebernya.

Pada forum tersebut, Sri Purnomo juga mempertegas dalam hal meminta kepada tim kesehatan agar hasil uji lab bisa keluar dengan cepat.

"Yang sudah PDP, bagaimana segera muncul positif atau negatifnya. Selama ini sudah meninggal, sampai satu minggu lebih belum tahu positif apa negatif. Kalau sejak awal tahu yang positif sudah diketahui, nanti kita langkahnya bisa pasti. Masyarakat bisa kita arahkan sebaik-baiknya," tandas Sri Purnomo.

ASN dilarang mudik

Sekda DIY Kadarman Baskara Aji angkat bicara terkait Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 41/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pada SE tersebut dijelas-

kan secara tegas larangan pergi ke luar daerah dan juga mudik bagi ASN. Bila melanggar ada sanksi yang akan diterapkan pada ASN yang bersangkutan.

"Kita ikuti. Jadi saya mendapat surat dari Kemen-PAN RB, kita teruskan kepada ASN bahwa ada larangan untuk mudik," ujarnya.

Terkait sosialisasi, Aji segera mengirim surat ke masing-masing kepala OPD yang akan diteruskan kepada masing-masing ASN yang berada di bawahnya.

"Pengawasannya, tentu masing-masing (ASN) akan membuat laporan keberadaan mereka. Atasan langsung punya tanggung jawab pengawasan terhadap anak buahnya," bebernya.

Terkait sanksi, Aji menjelaskan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur disiplin pegawai.

"Kalau sampai sudah ada aturan Kemen-PAN RB seperti itu, sudah peringati masih melakukan, tetap ada sanksi. Tapi sanksinya bukan pidana, tapi sanksi administratif," tegasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005